



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~762~~ TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026-2027

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah, perlu ditetapkan Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026-2027;
- b. bahwa Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026-2027.

KESATU : Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026-2027, dengan Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026 - 2027

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Dokumen	Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan serta saat tanggap darurat dan pasca bencana yang berupa diantaranya: • Mengurangi Risiko dan Dampak Bencana • Landasan/ pedoman perencanaan Pembangunan • Meningkatnya Kinerja Antar Lembaga	Kerja sama Pihak Ketiga	2026	• Anggaran bersumber dari APBD • Pengintegrasian dalam Renja dan Renstra
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten	Dokumen	Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan serta saat	Kerja sama Pihak Ketiga	2027	• Anggaran Bersumber dari APBD • Penginteg-rasi dalam

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
				Bencana			tanggap darurat dan pasca bencana yang berupa diantaranya: • Dokuemn rencana kontijensi • Penetapan Koordinator dan Pelaksana • Alokasi Sumber Daya • Prosedur Operasional Tanggap Darurat • Kesiapan dan komitmen Bersama • Peningkatan Kapasitas Masyarakat			Renja dan Renstra
2.	Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur: - Bagian Hukum	Pemerintahan Umum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	Terlaksana-nya pemberian bantuan hukum bagi orang miskin yang berhadapan dengan hukum	Membantu Masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri	Kerja Sama Pihak Ketiga	2026	Anggaran bersumber dari APBD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
	Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur: - Bagian Hukum	Pemerintahan Umum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kerja Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Meningkatkan kerja sama sebagai Upaya untuk menghadapi permasalahan hukum yang dapat timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan operasional Pemerintah Daerahdi bidang perdata dan tata usaha negara	Pelaksanaan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi terkait permasalahan bidang perdata dan tata usaha negara	Kerja Sama Pihak Ketiga	2026	Anggaran bersumber dari APBD
	Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur: - Bagian Hukum	Legislasi/ Peraturan Perundang- undangan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Duplikasi Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Optimalisasi Penyediaan Dokumen dan Informasi Hukum Melalui Website JDIH	Kerja Sama Sukarela		
3.	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Sampel Air Baku dan Pemeriksaan Sampel Air Sungai	Terdatanya Kualitas Air Baku dan Air Sungai untuk 3 Sungai 14 Sumber Air Baku	Terpantaunya Kualitas Air Baku dan Air Sungai di Kabupaten Belitung Timur	Kerja Sama Pihak Ketiga	2026-2027	Anggaran bersumber dari APBD dan APBN

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Meja Goyang, Tambang Timah, dan Smelter	• Data Analisis Residu Timah, Biji Timah, dan Terak Timah • Data Hasil Sampling Udara (PM 2,5 dan Partikular Debu)	Hasil Riset "Integrasi Kajian Tenorm, Tapak Disposol dan Keselamatan Jangka Panjang"	Kerja Sama Pihak Ketiga	2026-2027	Anggaran bersumber dari APBD dan APBN
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	BPJS Kesehatan bagi Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat desa, dan BPD)	Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan untuk Pemerintahan Desa	Meningkatnya Layanan Kesehatan bagi Pemerintah Desa	Kerja Sama Pihak Ketiga	2026-2027	• Anggaran bersumber dari APBD • Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat desa, dan BPD)	Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pemerintahan Desa	Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa	Kerja Sama Pihak Ketiga	2026-2027	• Anggaran bersumber dari APBD • Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Kerja Sama Pemerintahan Desa dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	Tersedianya Nota Kesepahaman Program Jaga Desa	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa)	Kerja Sama Pihak Ketiga	2026-2027	• Anggaran bersumber dari APBD • Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	Kerja Sama Sukarela	2026	-

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	-	Kerja Sama Sukarela	2026	-
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	Kerja Sama Sukarela	2026	-
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KEI)	-	-	-	Kerja Sama Sukarela	2026	-
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan	-	-	-	Kerja Sama Sukarela	2026	-

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penduduk dan Keluarga Berencana		Budaya Lokal						
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	-	Kerja Sama Sukarela	2026	-
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pengendalian dan Pendistribusi-an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Alat dan Obat Kontrasepsi	Terdistribusi-nya alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas Kesehatan dan jejaringnya	Terpenuhinya alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas Kesehatan dan jejaringnya	Kerja Sama Sukarela	2026	• Anggaran bersumber dari DAK Non Fisik BOKB • Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan	-	-	-	Kerja Sama Sukarela	2026	-

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
				Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB						
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	Kerja Sama Sukarela	2026	-
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyaraka- tan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PT Pos Indonesia untuk pengisian Pulsa Tim Pendamping Keluarga (TPK)	• Data register pengendalian lapangan; • Data register pelayanan kontrasepsi Fasyankes yang belum bisa melakukan input data secara online; dan • Data dasar Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan	• Tersedianya data register pengendalian lapangan; • Tersedianya data register pelayanan kontrasepsi Fasyankes yang belum bisa melakukan input data secara online; dan • Tersedianya data dasar Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan Stunting di	Kerja Sama Pihak Ketiga	2026	• Anggaran bersumber dari DAK Non Fisik BOKB • Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
						Stunting di Balai Penyuluhan KB	Balai Penyuluhan KB			
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyaraka- tan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Risiko Stunting (KRS)	• Jumlah anak stunting yang mendapat-kan orang tua asuh • Jumlah paket bantuan gizi yang disalurkan • Laporan bulanan OTAS dari Kecamatan/ Desa	• Peningkatan status gizi anak • Penurunan kasus stunting di desa sasaran • kolaborasi lintas sektor meningkat melalui peran orang tua asuh (instansi, Perusahaan, Masyarakat)	• Kerja Sama Sukarela • Kerja Sama Pihak Ketiga	2026	-
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan	-	-	PKS sidang di luar gedung Pengadilan Agama	Terlaksana- nya sidang di luar gedung Pengadilan Agama	Terlaksananya pelayanan hukum bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur	Kerja Sama Pihak Ketiga	2026-2027	-
					PKS Pemanfaatan putusan sidang untuk Updating Data Kependudukan	Penerbitan KK dan KTP bagi pasangan yang bercerai dan tercatat di Pengadilan Agama	Meningkatnya persentase updating data status perkawinan penduduk			

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
6.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jasa Pelayanan Tenaga Ahli Psikologi bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Belitung Timur	Pelayanan Psikolog bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Belitung Timur	Peningkatan pelayanan komprehensif bagi Perempuan dan Anak korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Belitung Timur	Kerja Sama Pihak Ketiga	2026	Anggaran bersumber dari APBN (DAK Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak)
			Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Kabupaten/ Kota						
		Sosial	Penanganan Bencana	Penyelengga- raan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jasa Pengiriman	Jasa Pengiriman barang logistik untuk Gudang Tagana	Tersedianya logistik bantuan untuk korban bencana di wilayah Kabupaten Belitung Timur	Kerja Sama Pihak Ketiga	2026	Anggaran bersumber dari APBD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
7.	Dinas Perikanan	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (Sub Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota)	Penyediaan Calon Induk (<i>Parent Stock</i>)	Tersediannya Benih Unggul berasal dari Induk Bersertifikat	Meningkatnya jumlah produksi Perikanan Budidaya serta terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah	Kerja Sama Wajib	2027	• Anggaran bersumber dari APBD • Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Keamanan Mutu Hasil Perikanan, CBIB, CPIB (<i>Parent Stock</i>)	Produk Hasil Perikanan Budidaya Bermutu dan Bersertifikasi	Pembudidaya Ikan Tersertifikasi	Kerja Sama Wajib	2027	• Anggaran bersumber dari APBD • Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD
					Terlengkapinya perizinan Perikanan Budidaya pada Komoditas Dilindungi	• Tersedianya Data Izin Penangkaran/ Pengelolaan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Ikan Arwana Lokal	Produk Unggulan Daerah Potensi Meningkatkan	Kerja Sama Wajib	2027	• Anggaran bersumber dari APBD • Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
						• Tersedianya produk Izin yang berkualitas sebagai Komoditas Strategis				
				Pemberdayaan Pembudi daya Ikan Kecil	Pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat lokal	• Dokumen Kajian Pengembangan Budidaya Kepiting bakau (<i>Scylla sp</i>) • Silvofishery untuk melestarikan Hutan Bakau Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit	Produk Budidaya Komoditas Perairan Payau Meningkatkan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove terlindungi	Kerja Sama Wajib	2027	• Anggaran bersumber dari APBD • Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD
		Urusan Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penyusunan Dokumen Kajian Blue Carbon pada Ekosistem Mangrove Kabupaten Belitung Timur	Tenaga Ahli dan Pengujian Laboratorium	Dokumen Kajian	Adanya data besaran Blue Carbon pada Ekosistem Mangrove di Kabupaten Belitung Timur	Kerja Sama Pihak Ketiga	2026	Anggaran bersumber dari APBD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang dan Dinas Perikanan	Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	• Pembentukan Jejaring Gabungan • Reaksi cepat perkarantinaan Ikan • Pembentukan Jejaring Gabungan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan • Koordinasi penguatan pelaksanaan <i>quality assurance</i> serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan • Penanganan tanggap darurat kasus kematian ikan dan/atau mutu hasil perikanan berdasarkan laporan masyarakat baik yang melalui system elektronik maupun secara langsung	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengelolaan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/ Kota	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Kerja Sama Pihak Ketiga	2026	Anggaran bersumber dari APBD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
					• Pemanfaatan bersama aplikasi SAOLIN • Pengembangan kompetensi sumberdaya aparatur dalam bidang Perkarantinaan Ikan melalui Pengenalan dasar Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) • Pengembangan kompetensi sumberdaya aparatur dalam sistem Penjaminan Mutu melalui pengenalan dasar Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di suplier • Penerapan program manajemen mutu terpadu berbasis HACCP • Penyadartahuan informasi, regulasi dan/ atau sistem perkarantinaan ikan dan mutu					

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
					• Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) ikan oleh Dinas yang membidaagi kelautan dan/ atau perikanan sebagai data dukung penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan antar area (KI-D2) dan/atau Hea-lth Certificate (KI-D 1) • Pelaksanaan Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina • Inventarisasi bersama Jenis Agen Berbahaya dan Invasif (JABI) • Dukungan pelaksanaan Gerakan Masyarakat hidup sehat (Germas) sesuai INPRES Nomor 01 Tahun 2017 • Pelaksanaan Studi Tiru (Benchmarking)					

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
					dan/ atau replikasi inovasi Masyarakat yang berkeadilan, demokratis yang efektif dan efisiensi, diperlukan kerja sama tentang Sinergi dan Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Kabupaten Belitung Timur					
8.	Kecamatan Kelapa Kampit	Urusan Kewilayahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Objek wisata Religi yang termasuk dalam Diaspora Demak	Terjalannya Kerjasama daerah antara Demak, Belitung Timur, Malaka dan Batavia	Terpeliharanya Situs Religi dan Jalur Pariwisata di Kelapa Kampit terbangun	Kerja Sama Sukarela	2027	• Anggaran bersumber dari APBD • Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/ Kota	Layanan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Layanan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Kerja Sama Sukarela	2026	Anggaran bersumber dari APBD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA DAERAH	PELAKSANAAN (TAHUN)	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pendataan: • Adminduk • Minol	Tertib Administrasi	Tertib Administrasi Kependudukan dan Perizinan	Kerja Sama Sukarela	2026	Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN